

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis kebijakan: dari Formulasi ke Implementasii Kebijakan Negara*, (Jakarta, 2002).

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Alifuddin, Moh, *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi*, (Jakarta: MAGNA Script Publishing, 2012).

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005).

Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

Irfan, Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).

Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

Monier, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).

Rasyid Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010).

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Supranto, *Pengukuran Tingkat kepuasan Pelanggan*, (Jakarta: Rineka ipt, 1997).

Sianipar, J.P.G., *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Control*

Birokrasi pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).

Tilaar dan Riant Nugroho, H.A.R., *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009).

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2014).

Jurnal

Akhyar, 'Kualitas Pelayanan Publik Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Administrasi', hal. 6 (2023)

Dayu Avivantoro, 'Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember', (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2016).

Emiliani Nindy Diana Rusega, 'Kinerja Pelayanan Publik', (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, 2023).

Fikri Jamal, 'Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pagedangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2020).

Gedion, 'Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Jurnal Ilmiah Admititrasi', hal. 7 (2020)

Herizal, 'Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik', *Journal of Governance and Social Policy*, (2020).

Ipan Nurhidayat,, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, (2023).

Muhammad Khoirul Anwar,dkk, 'Pengelolaan Pengaduan Di Kelurahan Serua Indah Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima', Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2019).

Ni Putu Tirka Widanti, 'Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (2022).

Nur Putri Yunita Simarmata, 'Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi', *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 4.2 (2022).

Oktaviana Karim, 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraab Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang', (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

Rahman dkk, 'Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1.3 (2024).

Rahman Al' Padil, 'Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2016).

Rahmayanti, 'Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Ilmiah Administrasi*, (2023).

Rizka Amalia, 'Potensi Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, 1.4 (2021).

Tias Vela Erdina, 'Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang', *Journal of Public Policy and Management Review*, (2017).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan
Sipil.

